



JADI KERAWANAN MASA PILPRES Panwaslu Cermati Netralitas PNS

YOGYA (KR) - Netralitas Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kota Yogyakarta selama Pemilu Presiden (Pilpres), ikut jadi pencermatan Panwaslu. Kendati belum ditemukan indikasi tak netral, namun hal itu tetap menjadi kerawanan.

Menurut Ketua Panwaslu Kota Yogyakarta, Agus Triyatno, Jumat (6/6), pencermatan yang akan dilakukan ialah penggunaan fasilitas negara. "PNS yang tidak netral itu sebenarnya mudah terlihat. Apalagi jika sudah ikut kampanye di salah satu pasangan

Capres dan menggunakan fasilitas negara," paparnya.

Pencermatan terhadap netralitas PNS ini dilakukan lantaran hampir semua kepala daerah ikut bergabung dalam tim sukses pasangan Capres. Dikhawatirkan, dalam pemenangannya ikut melibatkan unsur PNS hingga ajakan untuk memilih pasangan Capres yang didukung.

Oleh karena itu, tim sukses pasangan Capres dan Cawapres diminta segera melaporkan pelaksana kampanye ke

penyelenggara pemilu. Hal ini supaya Panwaslu dapat melakukan pemetaan lebih dini. Sanksi bagi PNS yang tidak netral sudah diatur dalam UU No 43/1999. "Pelaksana kampanye yang melibatkan PNS pun juga ada sanksi hukum," tandasnya.

Walikota Yogyakarta Haryadi Suyuti juga menekankan hal sama. Menurutnya, seluruh PNS di lingkungan Pemkot sudah diimbau tidak ikut terjun dalam politik praktis. Meski demikian, pada 9 Juli mendatang, hak suara wajib

digunakan atau tidak golput.

Haryadi menilai, sikap tidak netral PNS akan berdampak langsung terhadap pelayanan masyarakat. Terutama jika antar PNS secara terang-terangan mendukung pasangan Capres dan Cawapres yang berbeda. Sehingga suasana kerja menjadi tidak nyaman lantaran terkotak-kotak. "Saya imbau betul netralitas ini. Saya harap, PNS di Kota Yogyakarta bisa dewasa. Sumpah janji PNS harus dijaga betul," terangnya. (R-9)-a

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sekretariat Panwaslu (Bawaslu)	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 28 Mei 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005